BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah merupakan pranata penting dalam tiap Negara demokrasi, terlebih pada Negara berbentuk Republik seperti Indonesia. Hal ini terdapat dalam pasal 1 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”. Dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945 menyatakan bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokrasi”.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Pasal 1 Ayat 9 “KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan

penyelenggara pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, dan akuntabilitas. Hal tersebut merupakan pertimbangan dibentuknya Undang-Undang tentang penyelenggaraan pemilihan umum.

Menurut Miriam Budiardjo (Zaenal Mukarom, 2008:212), Partisipasi Politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan Negara, dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.

Menurut Kevin R. Hardwick (Zaenal Mukarom, 2008:212), menjelaskan bahwa partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, menyampaikan kepentingannya terhadap pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan tersebut.

Partisipasi politik adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam hal penentuan atau pengambilan kebijakan pemerintah baik itu dalam hal pemilihan pemimpin ataupun penentuan sikap terhadap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah untuk dijalankan, cara konvensional ataupun dengan cara non konvensional atau bahkan dengan kekerasan (*violence*).

Menurut Herbert Mclosky (Budiardjo, 2008:367), Partisipasi Politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik. Secara

umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik.

Melalui pemilihan umum memungkinkan semua pihak bisa terkomodasi apa yang diinginkan dan dicita-citakan sehingga terwujud kehidupan yang lebih baik dan menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokrasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, tetapi proses demokrasi lewat pemilihan umum yang lebih terdahulu belum mampu menyamakan nilai-nilai demokrasi yang matang. Hal itu disebabkan sistem politik yang otoriter. Harapan untuk menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak sejak penyelenggaraan pemilihan umum 2015 lalu yang berjalan cukup relatif lancar dan aman.

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 pasal 1 ayat 1 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokrasi.

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati juga memiliki fungsi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah sesuai kehendak bersama masyarakat di daerah sehingga diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat di daerah didasarkan pada visi, misi, program serta kualitas dan integritas calon kepada daerah yang sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah di daerah.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Bapak Basri, S. Ag pada hari Senin, 26 Februari 2018 pukul 10.00 WIB menyatakan bahwa:

Bahwa dalam pemilihan Kepala daerah masih banyak masyarakat yang belum ikut berpartisipasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dan kurangnya sosialisasi dari pihak KPU Kabupaten Tebo kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak peduli terhadap pentingnya hak suara masyarakat dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu perangkat KPU Kabupaten Tebo harus turun langsung kemasyarakat agar masyarakat mengenal akan pentingnya hak suara bagi pemilihan daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka peneliti melakukan penelitian tentang “Upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
2. Kurangnya keikutsertaan masyarakat dalam berpolitik.

3. Kurangnya pendataan daftar pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan permasalahan yang dihadapi tidak terlalu luas sesuai dengan identifikasi masalah, maka peneliti membatasi masalah sebagai berikut: kurangnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum kepada masyarakat Kabupaten Tebo dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tebo.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dalam meningkatkan partisipasi politik Masyarakat?
2. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tebo?
3. Bagaimanakah faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten Tebo dalam meningkatkan partisipasi Masyarakat?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilaksanakannya, penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan upaya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

2. Untuk mendeskripsikan partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tebo
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat KPU Kabupaten Tebo dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat diterima sebagai sumbangan yang bermanfaat pada perkembangan ilmu pengetahuan.
 - b. Sebagai sarana referensi bagi kalangan pemerintahan khususnya masyarakat luas pada umumnya.
 - c. Sebagai pedoman awal bagi penelitian yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.
2. Manfaat praktis
 - a. Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebuah gambaran tentang peran komisi pemilihan umum dalam memaksimalkan peranannya pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2017.
 - b. Bagi masyarakat, penelitian ini bisa menjadi sebuah pengetahuan untuk mengetahui apa saja peran yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo tahun 2017.